

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kalimantan Barat memiliki 12 kabupaten, 2 kota dan dihuni oleh berbagai etnik. Etnik tersebut diantaranya adalah Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Madura, Padang, Bugis, Sunda, Batak, Ambon, dan lainnya. Penduduk Kalimantan Barat yang menyebar di daerah kabupaten/kota; tidak ada yang terkonsentrasi berdasarkan kepada kelompok etnik tertentu (*mono ethnic groups*). Umumnya Kalimantan Barat dihuni oleh berbagai etnik yang tidak merata proporsinya di berbagai Kabupaten. “Kabupaten Pontianak, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, kelompok etnik Dayak merupakan jumlah mayoritas, sementara di Kabupaten Sambas dan Ketapang yang didominasi etnik Melayu” (Alqadrie, 2000:18).

Adanya kelompok dominan menimbulkan konsep mayoritas dan minoritas. Bila dikaitkan dengan kekuasaan, maka “kekuasaan itu selalu didominasi oleh kelompok mayoritas” (Liliweri, 2009:101). Ini realitas kecemburuan sosial bagi kelompok minoritas, dan menjadi salah satu sebab terjadinya konflik antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok. Menurut jenisnya, “konflik dibedakan menjadi konflik vertikal atau konflik atas dan konflik horizontal” (Susan, 2009:92).

Konflik vertikal atau konflik atas dimaksudkan adalah konflik antara elit dan massa (rakyat). Elit dalam hal ini adalah para pengambil kebijakan di tingkat

nasional, provinsional, kelompok bisnis atau aparat militer. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) sendiri seperti konflik antar agama dan konflik antar suku. Bila dilihat dari tipe konflik yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan situasi yang ada, maka dapat dikelompokkan menjadi ‘tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka dan konflik di permukaan’ (Fisher dalam Susan, 2009:92).

Tipe tanpa konflik menggambarkan situasi yang relatif stabil, hubungan antar kelompok dapat saling mengisi dan damai. Tipe ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, tetapi karena masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah ke arah konflik kekerasan. Selain itu karena sifat budaya yang memungkinkan anggota masyarakat menjauhi permusuhan dan kekerasan.

Tipe konflik laten adalah suatu keadaan yang di dalamnya terdapat banyak persoalan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan agar dapat dicarikan solusinya.

Konflik terbuka adalah situasi ketika konflik sosial telah muncul ke permukaan yang telah berakar secara mendalam dan sangat nyata sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab serta berbagai efeknya. Sedangkan konflik di permukaan, memiliki akar yang dangkal bahkan tidak berakar dan muncul karena kesalahpahaman mengenai sasaran sehingga dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi atau dialog terbuka.

Untuk mencegah terjadinya konflik pada suatu masyarakat, perlu dikaji sumber munculnya konflik. Bila sumbernya dari kelompok mayoritas dalam kekuasaan, maka gagasan mayoritas dalam kekuasaan itu harus dimbangi oleh

kemungkinan ‘membiarkan kaum minoritas untuk turut serta menjalankan kekuasaan melalui partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan’ (Jefferson dalam Liliweri, 2009:101). Suatu kelompok sosial akan mampu mendominasi kekuasaan bila secara internal kelompok tersebut mampu menjaga solidaritas para anggotanya.

Kelompok mayoritas dalam suatu masyarakat merupakan sumber daya dan merasa memiliki kekuasaan untuk mengontrol, sedangkan kelompok minoritas kurang mempunyai akses terhadap sumber daya bahkan kurang berpeluang memperoleh kekuasaan. Pandangan inilah mendorong prasangka mayoritas terhadap minoritas. Kelompok minoritas dianggap lebih rendah dari kelompok mayoritas. Konsep kelompok mayoritas dan minoritas etnik di daerah Kalimantan Barat memberikan kekhasan tersendiri. Kekhasan ini dikenal dengan daerah rawan konflik. Konflik muncul dalam setiap entitas stratifikasi sosial yang berusaha untuk memperjuangkan posisi kelompoknya.

Konflik etnik merupakan suatu hal yang lumrah dalam masyarakat multietnik seperti di Kalimantan Barat. Konflik seperti ini telah terjadi berulang kali, bahkan Alqadrie (2002) mengungkapkan bahwa konflik kekerasan antar etnik di Kalbar sudah terjadi 13 (tiga belas) kali. Di antaranya suku Melayu berhadapan dengan suku Madura di Sambas tahun 1996-1997, dan suku Dayak melawan suku Madura pendatang di Sambas Kalimantan Barat tahun 1999. Konflik etnik merupakan akibat dari hubungan sosial yang intensif (yang sering terlibat dalam interaksi sosial) antara kelompok etnik yang berbeda.

Chang, W. (2003:27), mengungkapkan “konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak pernah dapat diatasi sepanjang sejarah umat manusia”. Selama seseorang masih hidup hampir mustahil untuk menghilangkan konflik dalam masyarakat. Faktor penyebab konflik berupa berbagai macam keinginan seseorang yang tidak terpenuhi, perbedaan pandangan antar perorangan yang tidak dapat diatasi secara adil dan proporsional. Sejarah pahit yang tidak menyenangkan akan menyebabkan konflik berkepanjangan dan bahkan hal itu dapat menciptakan kebencian dari satu generasi ke generasi lainnya. Sikap demikian menimbulkan perilaku yang kurang tepat dan mempermudah terjadinya gesekan antar etnik.

Budimansyah (2010:7), menyatakan: “sumber terjadinya perilaku buruk dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (*socio-cultural animosity*)”. Sebagai contoh bila terjadi senggolan kendaraan bermotor, atau merasa tersinggung akibat ulah seseorang yang berbeda etnik, hal demikian cenderung menyebabkan perkelahian antar pribadi. Bila tidak segera ditangani, ia kemungkinan besar dapat menyulut konflik antar etnik. *Socio-cultural animosity* juga dapat dilihat pada sasaran kemarahan penduduk asli terhadap pendatang. Hal ini ditegaskan oleh Marzali (2003:23) bahwa:

Peristiwa kerusuhan yang dimulai oleh suku Melayu (1996) dan Dayak (1997 dan 2001) melawan pendatang Madura, anggota-anggota dari etnik lain berpihak pada penduduk asli meskipun yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak.

Di sisi lain, suatu penelitian yang dilakukan Shonhaji (2001) dalam Marzali (2003:23-24), menunjukkan bahwa ‘betapa tidak aman dan tidak nyamannya untuk hidup di sebuah kampung bersama dengan para pendatang Madura’. Secara

umum karakteristik orang Madura seperti sangat percaya diri dan independen, dipandang negatif dan dinilai egois oleh orang lain; mempunyai sikap terus terang, dipersepsikan sebagai sikap tidak sopan; pemberani, dipandang kurang disenangi oleh orang lain; sikap ekstrovert yang lugu dianggap kekasaran bagi orang lain, amat setia yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain serta etos kerja yang tinggi membuat kecemburuan sosial ekonomi dari orang lain. Hal demikian menimbulkan ketidaknyamanan etnik-etnik lain sehingga sulit untuk membangun integrasi sosial dalam suatu masyarakat.

Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang telah terjadi seperti krisis ekonomi yang tidak kunjung henti bahkan berkembang pada krisis sosial dan politik. Sumantri (2011:1) menyatakan perlu adanya suatu terapi mental sebagai “upaya penyembuhan dari penyimpangan perilaku fisik dan psikologis bangsa serta membangkitkan kesadaran jiwa untuk menggairahkan peran hati nurani kita sebagai makhluk Tuhan, pribadi dan bangsa Indonesia”.

Bila kita mengaitkan ikhwal etnikitas di atas dengan kondisi Kabupaten Ketapang yang terdiri dari berbagai agama, suku dan budaya, dalam wilayah yang luas sehingga memungkinkan timbulnya konflik horizontal yang dapat merugikan dan mengganggu ketenteraman kehidupan masyarakat bahkan membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, perlu kiranya dibangun suasana kehidupan yang damai dan harmonis.

Kesepakatan perdamaian terus menerus digalakkan baik oleh tokoh masyarakat maupun oleh pihak-pihak yang kompeten, meskipun belum

merupakan hasil yang bersifat permanen. Konflik tidak selamanya merugikan, akan tetapi dapat memberikan berbagai manfaat. Fisher, dkk. (2001:4), Direktur *Responding to Conflict* (RTC), menyatakan berbagai manfaat konflik antara lain adalah “membuat orang-orang menyadari adanya banyak masalah, mencari solusi pemecahannya, menjadi sumber motivasi untuk berubah dan menimbulkan kesenangan”. Oleh karena itu perlu dibedakan antara konflik dan kekerasan.

Kekerasan bukan sekedar perilaku tetapi menyangkut konteks dan sikap. Dalam pengertian ini kekerasan dibagi menjadi dua yaitu: “(1) kekerasan yang terlihat dan (2) kekerasan yang tidak terlihat” (Fisher, dkk., 2001:10). Bentuk kekerasan yang terlihat misalnya perkelahian, pemukulan dan pembunuhan. Sedangkan kekerasan yang tidak terlihat seperti kebencian, ketakutan, ketidakpercayaan, ketidaktoleranan, yang bersumber dari sikap, perasaan dan nilai-nilai. Bentuk kekerasan ini merupakan kekerasan dalam konteks, sistem dan struktur atau melembaga.

Meskipun saat ini kondisi keamanan relatif stabil, bukan tidak mungkin konflik di Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang kembali terulang. Diprediksi pada tahun 2020, akan kembali terjadi konflik antar kelompok etnik. Hasil tersebut berdasarkan hipotesis Alqadrie (2008). Hipotesis yang dikemukakan Alqadrie berdasarkan fakta sejarah. ”Konflik yang terjadi di Kalbar, periode pertama tahun 1900, kedua 1930, ketiga 1960 dan keempat 1990-an,” yang disampaikan dalam seminar politik yang bertemakan Penguatan Forum Komunikasi Antar Etnik di Kalbar Dalam Merekonsiliasi Antar Etnik Guna Mencegah Terjadinya Konflik tahun 2008.

Menurut Alqadrie (2008), ada empat faktor utama penyebab terjadinya konflik, sebagai berikut:

Pertama, dikarenakan pemerintah pusat tidak memperhatikan Kalbar. Membuat otonomi daerah, tapi kepala dilepas ekor dipegang; Kedua, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota hanya sibuk mengurus kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat; Ketiga, para elit politik dan ekonomi, tokoh kelompok dan etnik serta pemimpin masyarakat hanya bekerja mengejar kepentingan pribadi dan kelompok tetapi mengesampingkan kepentingan masyarakat kecil di daerah yang semakin termarginalkan; Keempat, para tokoh etnik dan pemimpin masyarakat tidak memiliki karakter dan sikap multikultural. Kalaupun ada mereka tidak mensosialisasikannya kepada anggota kelompok mereka sehingga masyarakat multikultural sulit berkembang.

Pernyataan Alqadrie tersebut hanyalah prediksi belaka karena konflik tidak sama dengan kejadian alam yang lazim terdapat siklusnya. Sebenarnya, siklus apapun dapat terganggu, tidak selalu berjalan linear, tetapi terdapat *rupture* dan tidak merata. Sebagai contoh, perubahan iklim dalam dua dasawarsa terakhir membuat kita semakin sulit memprediksi kapan musim hujan dan kapan musim kemarau, atau bahkan sulit membedakan keduanya di berbagai wilayah Indonesia. Demikian juga kita tentu tidak menghendaki pernyataan Alqadrie menjadi semacam “*self-fulfilling prophecy*”, apalagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab untuk merekayasa konflik di Kalimantan Barat.

Konflik memang tidak dapat dihindari dari proses interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat baik antar individu, individu dengan kelompok dan antar kelompok masyarakat, akan tetapi konflik dapat dihindari bahkan melalui konflik dapat menciptakan integrasi. Orang-orang yang terlibat dalam interaksi sosial cenderung menekankan orientasi subyektif. Johnson (Lawang, 1986:113) mengungkapkan ‘orientasi subyektif inilah yang mengendalikan pilihan-pilihan

individu dalam tindakan sosial dan secara normatif diatur atau dikendalikan oleh nilai dan standar normatif bersama’.

Kabupaten Ketapang termasuk daerah yang multietnik sehingga proses disintegrasi juga sangat rentan terjadi seperti juga di kabupaten/kota lain yang berada dalam kawasan Provinsi Kalimantan Barat. Pertikaian antar etnik di Kabupaten Ketapang tetap ada, baik dalam konteks individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok, akan tetapi cepat terselesaikan sehingga tidak meluas ke mana-mana. Kabupaten Ketapang termasuk daerah yang dapat mengendalikan masyarakat dari ancaman konflik antaretnik. Bahkan pada saat terjadinya konflik Sambas di Kalbar dan konflik Sampit di Kalteng, semua etnik melalui pemuka suku yang hidup di bumi Kabupaten Ketapang, berikrar untuk menjauhi perselisihan, pertengkaran, saling curiga, permusuhan, penipuan dan cari menang sendiri, omongan dan perbuatan yang membangkitkan kemarahan, perkelahian dan pembunuhan. Sebaliknya, kami mau mengembangkan budi bahasa yang sopan dan halus, ramah dan bersahabat, bertekad menumbuhkan kejujuran dan kebenaran, tingkah laku yang sopan dan terpuji. Ikrar tersebut dibacakan pada hari Rabu, 21 Maret 2001.

Kemudian pada hari Sabtu, 6 September 2003 dibacakan lagi ikrar dan pernyataan pemuka suku-suku yang bermukim di Kabupaten Ketapang dengan sedikit penambahan redaksi yakni apabila ada perselisihan individu, tidak akan dibawa ke dalam kelompok suku, dan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka juga berjanji takkan terprovokasi untuk melakukan pertikaian antaretnik seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah. Ikrar itu diucapkan wakil

sembilan etnik dalam acara adat Tolak Bala yang dipimpin Raja Ulu Ae'k, Petrus Singa Bansa, yang ditandatangani oleh pemuka suku Madura, Melayu, Tionghoa, Jawa, Bugis, Padang, Batak, NTT dan Dayakserta Lourensius Madjun selaku ketua panitia dan Morkes Effendi sebagai Bupati Ketapang.

Tindakan mengucapkan ikrar bersama yang dilakukan oleh masyarakat Ketapang ini sejalan dengan konsep Parsons (dalam Lawang, 1986:114) bahwa ‘elemen dasar tindakan seseorang itu berorientasi pada motivasional dan nilai’. Bila motivasi dan nilai yang ingin dicapai berkaitan dengan sumber daya alam dan berorientasi material, maka akan menimbulkan masalah ekonomi. Adam Smith (Rosyidi, 1996:52) merumuskan masalah ekonomi sebagai ‘setiap usaha manusia untuk mengeksploitir alam dalam usahanya menghasilkan kekayaan material’. Usaha manusia yang demikian ini juga dapat menjadi sumber munculnya konflik. Kekayaan alam yang dimiliki oleh suatu daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum pendatang atau migrasi dari daerah lain yang kurang menguntungkan.

Migrasi menurut Munir (2004:116) adalah “perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara”. Selanjutnya, Rustiadi, dkk (2011:295), migrasi pada dasarnya adalah “suatu bentuk respons dari orang-orang dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya”. Jadi jelas kiranya mengapa orang melakukan migrasi. Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi yaitu “faktor pendorong dan faktor penarik” (Munir, 2004:119).

Faktor pendorong migrasi antara lain seperti makin berkurangnya sumber-sumber daya alam, menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal, adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal, tidak cocok lagi dengan adat/budaya/kepercayaan di tempat asal, perkawinan dan bencana alam. Sedangkan faktor penarik antara lain seperti adanya rasa superior di tempat yang baru, kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok dan mendapatkan hasil yang lebih baik, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, keadaan lingkungan dan suasana hidup yang menyenangkan serta tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung. Berkaitan dengan faktor tersebut, Lee (dalam Munir, 2004:120) menyatakan ada 4 faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi, yaitu:

1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal
2. Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan
3. Rintangan-rintangan yang menghambat
4. Faktor-faktor pribadi.

Setiap tempat asal dan tujuan, terdapat sejumlah faktor positif yang menahan orang-orang untuk tetap tinggal di lokasi tersebut, dan menarik orang luar untuk pindah ke tempat itu. Selain itu, ada sejumlah faktor negatif yang mendorong orang untuk pindah dari tempat tersebut serta terdapat sejumlah faktor netral yang tidak menjadi masalah dalam keputusan melakukan migrasi. Oleh karena itu, migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya densitas (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang melakukan migrasi, adanya desentralisasi dalam pembangunan serta komunikasi dan transformasi yang semakin lancar.

Menjadi rasional, jika masyarakat Ketapang terdiri dari berbagai etnik, suku dan agama karena banyak orang yang melakukan migrasi dari daerah luar karena memiliki daya tarik dan pendorong. Daya tarik bahwa penduduk setempat (asli) menerima siapa saja yang datang ke Ketapang, sedangkan pendorongnya berupa keinginan dari pendatang untuk memperbaiki taraf kehidupan yang lebih baik dari daerah asalnya. Namun, bila rasa persaudaraan dan sikap toleransi kurang diperhatikan, maka bukan hal yang mustahil akan terjadi konflik antara pendatang dengan penduduk asal.

Masyarakat di Kabupaten Ketapang menyadari bahwa dengan terpeliharanya nilai-nilai hidup damai, rukun, saling menghormati, menghargai, serta meningkatkan tali persaudaraan sejati antara satu dengan lainnya akan terjalin keharmonisan hidup bermasyarakat antaretnik. Harmonisasi hidup bermasyarakat akan tercipta bila setiap anggotanya memiliki sikap toleransi.

Yamin dan Aulia (2011:5) menyatakan toleransi merupakan:

Satu sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar bebas menyampaikan pendapat kendatipun pendapatnya belum tentu benar atau berbeda. Dari pernyataan tersebut secara umum, toleransi berarti mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan.

Hakikat toleransi pada dasarnya adalah hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dan saling menghargai di antara keragaman (*mutual respect*). Lebih lanjut, Walzer (Yamin dan Aulia, 2011:5-6) menyatakan ada lima hakikat toleransi, sebagai berikut '(1) menerima perbedaan untuk hidup damai, (2) menjadikan keseragaman menuju perbedaan, (3) menerima bahwa orang lain memiliki hak yang harus dihargai, (4) mengungkapkan transparansi pada yang lain, ingin tahu, menghargai, ingin mendengarkan dan belajar dari orang lain, (5)

memberikan dukungan terhadap perbedaan dan mempertegas aspek otonomi setiap orang lain'. Dengan adanya sikap toleransi dari setiap warga masyarakat akan terjalin integrasi sosial. Oleh karena itu, timbul upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai integrasi (sosial) kepada anggota keluarga masing-masing dengan cara yang berbeda antara etnik yang satu dengan etnik yang lainnya. Di dalam keluarga, terjadi proses sosialisasi yaitu proses pengintegrasian individu ke dalam kelompok sebagai anggota kelompok yang memberikan landasan sebagai makhluk sosial. Di dalam keluarga juga terjadi proses pendidikan dalam arti "proses pendewasaan dari individu yang tidak berdaya kepada calon pribadi yang mengenal pengetahuan dasar, norma sosial, nilai-nilai dan etika pergaulan" (Sumaatmadja, 2005: 32).

Dalam konteks yang lebih luas, kita memiliki nilai-nilai kebangsaan atau nilai yang berakar dari budaya bangsa (budaya Indonesia) yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat untuk diwariskan kepada generasi penerus dalam kehidupan baik sebagai anggota keluarga, masyarakat maupun warga negara. Pewarisan nilai-nilai di atas dapat dilakukan melalui pendidikan, baik informal, nonformal maupun formal.

Secara normal, tiap individu memiliki potensi dasar mental yang berkembang dan dapat dikembangkan melalui proses pendidikan. Potensi dasar itu meliputi:

- (1) minat (*sense of interest*), (2) dorongan ingin tahu (*sense of curiosity*), (3) dorongan ingin membuktikan kenyataan (*sense of reality*), (4) dorongan untuk menyelidiki (*sense of inquiry*), (5) dorongan ingin menemukan sendiri (*sense of discovery*) (Sumaatmadja, 2003:37).

Kelima potensi dasar mental ini akan berkembang secara maksimal jika ada rangsangan, ada wadah, dan suasana yang kondusif untuk itu. Di sinilah

kedudukan masyarakat dengan interaksi sosial dan rangsangan-rangsangan sosial menjadi suasana berkembangnya individu, khususnya potensi mental yang ada dalam diri individu tersebut.

Wujud potensi mental individu tidak terlepas dari karakter yang dimilikinya dan dapat terbentuk dari proses pendidikan yang didapatkannya serta lingkungan sosial yang mengitarinya. Selain itu, latar belakang kultur dan etnik juga turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter individu, sehingga berpengaruh pada interaksi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, Sumantri (2011:9) menyatakan:

Pendidikan budaya dan karakter berfungsi sebagai (1) pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, (2) perbaikan untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat, dan (3) penyaring untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Ketiga fungsi tersebut di atas akan mempengaruhi kualitas karakter warga komunitas etnik di Ketapang. Bagaimana komposisi dan distribusi penduduk di Kabupaten Ketapang menurut etnik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1.

Persentase Distribusi Penduduk Kabupaten Ketapang Menurut Etnik 2010

No	Kecamatan	Melayu (%)	Dayak (%)	Cina (%)	Madura (%)	Jawa (%)	Bugis (%)	Lainnya (%)	Jumlah Penduduk (%)
1.	Kendawangan	20.478 (63)	4.876 (15)	650 (2)	2.600 (8)	2.275 (7)	325 (1)	1.300 (4)	32.505 (100)
2.	Manis Mata	10.836 (44)	12.314 (50)	- 0	- 0	246 (1)	- 0	1.231 (5)	24.627 (100)
3.	Marau	1.190 (10)	9.283 (78)	595 (5)	- 0	357 (3)	- 0	476 (4)	11.901 (100)
4.	Singkup	492 (8)	4.123 (67)	369 (6)	- 0	923 (15)	62 (1)	185 (3)	6.154 (100)
5.	Air Upas	997 (6)	11.634 (70)	332 (2)	- 0	2.825 (17)	166 (1)	665 (4)	16.620 (100)
6.	Jelai Hulu	939 (6)	12.518 (80)	1.408 (9)	- 0	313 (2)	- 0	469 (3)	15.648 (100)
7.	Tumbang Titi	1.863 (8)	13.972 (60)	2.329 (10)	699 (3)	3.027 (13)	466 (2)	931 (4)	23.286 (100)
8.	Pemahan	3.246 (73)	534 (12)	44 (1)	44 (1)	178 (4)	267 (6)	133 (3)	4.446 (100)
9.	Sungai Melayu Rayak	6.641 (57)	2.330 (20)	466 (4)	117 (1)	1.631 (14)	117 (1)	350 (3)	11.650 (100)
10.	Matan Hilir Selatan	21.064 (69)	3.053 (10)	611 (2)	1.526 (5)	3.053 (10)	305 (1)	916 (3)	30.528 (100)
11.	Benua Kayong	29.187 (83)	- 0	- 0	3.517 (10)	352 (1)	352 (1)	1.758 (5)	35.165 (100)
12.	Matan Hilir Utara	8.106 (55)	1.769 (12)	442 (3)	737 (5)	295 (2)	2.358 (16)	1.032 (7)	14.739 (100)
13.	Delta Pawan	60.783 (85)	2.860 (4)	1.430 (2)	3.575 (5)	715 (1)	715 (1)	1.430 (2)	71.509 (100)
14.	Muara Pawan	10.356 (79)	131 (1)	- 0	1.180 (9)	524 (4)	262 (2)	655 (5)	13.109 (100)
15.	Nanga Tayap	7.972 (29)	16.494 (60)	550 (2)	- 0	825 (3)	550 (2)	1.100 (4)	27.490 (100)
16.	Sandai	17.621 (72)	3.671 (15)	734 (3)	245 (1)	489 (2)	- 0	1.713 (7)	24.474 (100)
17.	Hulu Sungai	116 (1)	11.091 (96)	231 (2)	- 0	- 0	- 0	116 (1)	11.553 (100)
18.	Sungai Laur	2.004 (12)	13.863 (83)	334 (2)	- 0	167 (1)	- 0	334 (2)	16.702 (100)
19.	Simpang Hulu	557 (2)	26.733 (96)	278 (1)	- 0	- 0	- 0	278 (1)	27.847 (100)
20.	Simpang Dua	150 (2)	7.207 (96)	75 (1)	- 0	- 0	- 0	75 (1)	7.507 (100)
Total		38,2 46,252,85	2,451,753,55						427.460(100)

Sumber Data : Bagian Tapem Setda Kabupaten Ketapang Th. 2011 (setelah diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang diwarnai dengan bermacam suku bangsa. Hal ini ditandai dengan berbagai macam agama yang dianut, bahasa,

logat, pola kebudayaan, serta sistem nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat sangat beragam. Meskipun tingkat keragaman masyarakatnya cukup tinggi, namun toleransi kehidupan masyarakat yang berbeda agama maupun suku bangsa cukup terpelihara dengan baik. Konflik sosial yang pernah terjadi antara tahun 1999-2002 hanya melibatkan suku tertentu yang bermula dari masalah pribadi berdampak pada kelompok atau suku dan belum pernah melibatkan seluruh suku bangsa yang mengarah pada konflik berlatar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Keberadaan berbagai etnik di Ketapang mempunyai maksud dan tujuan yang bervariasi. Ada yang ingin memperbaiki kesejahteraan hidup, ada yang ingin berdagang. Terdapat juga beberapa alasan lain seperti perkawinan dan bencana alam di daerah asal warga pendatang.

Keberadaan etnik Melayu tidak dapat dipisahkan dari peninggalan beberapa kerajaan yang pernah ada di Kalimantan Barat seperti Kesultanan Pontianak, Kesultanan Sambas dan Kerajaan Matan di Ketapang serta beberapa kerajaan kecil (penambahan) yang terdapat pada beberapa kabupaten seperti Mempawah, Ngabang, Sintang dan Putusibau.

Menurut Noor (2005:34), etnik Melayu Kalimantan Barat mengacu kepada “istilah Melayu yang berasal dari kata *Mo Lo Yue* yang merupakan nama sebuah kerajaan di Jambi pada abad ke 8 Masehi”. Di Kalimantan Barat sebutan Melayu adalah untuk menunjukkan penduduk asli Kalimantan yang datang setelah Dayak. Oleh karena itu, sebutan abang kepada orang Dayak untuk menyatakan bahwa

orang Dayak adalah saudara tua orang Melayu. Dengan demikian, muncul teori bahwa Dayak merupakan *proto-malays*, dan Melayu adalah *deutero-malays*.

Menurut sejarah “nenek moyang orang Dayak dahulu kala berasal dari Yunan di Cina Selatan” (Coomans, 1987). Dari tempat tersebut kelompok-kelompok kecil mengembara melalui Indo Cina ke jazirah Malaysia, yang menjadi batu loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, ada kelompok yang memilih batu loncatan lain yakni melalui Hainan, Taiwan, dan Filipina kemudian masuk ke Kalimantan.

Menurut Akil (1994:190) perpindahan itu diperkirakan karena:

Penduduk Yunan pada waktu itu mencari tempat yang dianggap paling bisa memberikan peluang dan kebebasan bagi mereka untuk mencari nafkah, khususnya untuk berladang dan berburu, rupanya perpindahan itu tidak hanya berlangsung sekali terjadi, tetapi berlangsung secara bertahap.

Menurut Coomans (1987:3-4) “kelompok pertama yang masuk wilayah Kalimantan adalah kelompok Weddid yang sekarang sudah tidak ada lagi”. Kemudian disusul dengan kelompok yang lain yang lebih besar disebut Proto Melayu. Perpindahan mereka berlangsung dalam seribu tahun dan terjadi kira-kira 3000-1500 Sebelum Masehi.

Lebih lanjut Coomans (1987:4) menyatakan bahwa “sekitar lima ratus tahun Sebelum Masehi berlangsung lagi suatu perpindahan besar dari daratan Asia ke Kalimantan dengan memilih waktu dan jalan yang berbeda”. Kelompok-kelompok ini disebut *deutro-melayu*. Kemungkinan suku bangsa Dayak yang bermukim di Kalimantan Selatan dan Tengah beberapa tahun terlebih dahulu singgah di Sumatera dan Jawa, sedangkan suku bangsa Dayak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tidak singgah. Suku bangsa Murut, yang bermukim di bagian

utara Kalimantan Timur, mungkin masuk Kalimantan lewat Filipina, setelah lama tinggal di sana sebelum masuk Kalimantan. Suku bangsa ini menguasai sistem irigasi, yang tidak dikenal oleh suku-suku bangsa lain; bahkan Afen (1995:12), menduga bahwa “migran dari Yunan tersebut mendiami Pulau Kalimantan sudah sejak zaman Megalithikum dan Neolithikum kurang lebih 1500 Sebelum Masehi”.

Lontaan (1975:32) mengemukakan bahwa:

Imigran yang datang dari Yunan tersebut yang dikatakan sebagai cikal bakal suku Dayak ini, begitu sampai di Kalimantan pada mulanya mendiami tepi Sungai Kapuas atau Laut Kalimantan, tetapi dengan datangnya Melayu dari Sumatera dan tanah Semenanjung Malaka, akhirnya mereka semakin terdesak ke hulu sungai bertambah lama bertambah jauh kesebelah darat Pulau Kalimantan.

Versi lain menyebutkan bahwa “perpindahan orang Dayak ke daerah pedalaman itu terpaksa dilakukan dalam pengembaraan mencari lahan yang makin baik untuk berladang, khususnya padi untuk makanan pokoknya” (Susanto, 1998:156). Para pakar (arkeologi, antropologi dan sejarawan) sudah lama meyakini bahwa nenek moyang kelompok-kelompok etnik yang mendiami kepulauan Nusantara termasuk Kalimantan Barat di masa lalu berasal dari beberapa kawasan, terutama Yunan dan Taiwan 3000 – 1500 Sebelum Masehi. Di antara beberapa kelompok etnik utama itu adalah etnik Dayak dan Melayu, yang selanjutnya disusul oleh etnik-etnik lain seperti Tionghoa, Bugis, Madura, Jawa, Sunda, dan Batak.

Penduduk Kabupaten Ketapang yang multietnik seperti pada tabel 1.1 di atas tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antaretnik. Misalnya, konflik di daerah kecamatan, baik antar sesama etnik maupun antaretnik yang berbeda, akan tetapi tidak sampai melebar atau meluas ke wilayah lainnya di

Ketapang. Konflik dapat terjadi karena persepsi mengenai perbedaan kepentingan, nilai-nilai atau kebutuhan. Kepentingan berkaitan dengan perasaan seseorang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Ketidaksesuaian terhadap keinginan antara satu pihak dengan pihak lain inilah mengakibatkan terjadinya konflik, baik antarindividu, individu dengan kelompok maupun kelompok etnik tertentu dengan kelompok etnik yang lainnya. Konflik lebih banyak dipahami sebagai “keadaan tidak berfungsinya komponen-komponen masyarakat sebagaimana mestinya atau gejala penyakit di dalam masyarakat yang terintegrasi secara tidak sempurna” (Bachtiar, 2010:107).

Sejalan dengan itu, teori Malthus (dalam Rosyidi, 1996:88) berpendapat bahwa ‘penduduk apabila dibiarkan saja, maka jumlahnya akan berkembang secara deret ukur, dan akhirnya menjadi sedemikian besar sehingga tiada tempat lagi untuk manusia yang menghuninya. Di lain pihak, alat-alat pemuas kebutuhan manusia pun berkembang, tetapi melalui jalur deret hitung saja’. Pandangan Malthus tersebut dapat dipahami bahwa ketidakseimbangan keinginan yang diharapkan seseorang dengan alat pemuas kebutuhan manusia akan menimbulkan gesekan bahkan konflik sesama manusia.

Konflik yang terjadi di daerah Ketapang karena adanya perbedaan kepentingan baik yang bersifat pribadi, maupun kelompok, seperti yang terjadi di daerah perkebunan sawit antara buruh dengan pihak perusahaan tahun 2010. Konflik-konflik kecil antaretnik juga terjadi di Ketapang tahun 2011 yang melibatkan masalah muda-mudi, seperti tabrakan sepeda motor di desa Mulia Kerta. Namun, konflik tersebut dapat diredam sehingga tidak meluas ke daerah

lainnya. Hal inilah yang menarik untuk dikaji, mengapa di Kabupaten Ketapang, tidak ada catatan yang mengungkapkan konflik sosial masyarakat multietnik secara meluas, bahkan selama terjadinya konflik di wilayah Kalimantan Barat, kelompok etnik di Kabupaten Ketapang tidak terjadi gejolak dan mereka tetap hidup harmonis. Kondisi yang demikian inilah menurut penulis menarik untuk diteliti.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Konflik sulit untuk dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu konflik antar individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok dalam masyarakat. Konflik sebagai perbedaan persepsi membuka kemungkinan bahwa salah satu pihak percaya adanya konflik kepentingan, sementara pihak lainnya tidak. Kasus semacam ini, salah satu pihak jelas salah. Misalnya persepsi penduduk setempat (etnik asli) terhadap kaum pendatang sebagai penyebab terjadinya kerusuhan dan dapat memusnahkan eksistensi budaya lokal (asli), sehingga mereka akan tetap bertindak sesuai dengan apa yang dipersepsikannya. Berbeda dengan pendatang, mereka memandang perbedaan kepentingan yang dideskripsikan oleh penduduk lokal (asli) sebagai sumber potensi yang telah memberikan kontribusi dan memperkaya identitas mereka serta menjadi ancaman terhadap keberadaannya sebagai kaum pendatang.

Seiring dengan proses asimilasi yang bersamaan dengan pembukaan dan penghunian wilayah baru dalam kurun waktu tertentu, adanya perkawinan silang (campur antara penduduk setempat dengan pendatang), pergeseran bahasa, pakaian

dan kelahiran generasi baru, semuanya ini merupakan situasi atau pembentukan satu masyarakat untuk mengubah identitas mereka sebelumnya.

Sesungguhnya potensi konflik muncul ketika terjadi kontak antar manusia, terutama dalam hal memenuhi tujuan individu. Peluang dalam memenuhi tujuan individu dapat dilakukan dengan cara bersaing secara sehat atau terpaksa terlibat dalam konflik dengan pihak lain. Umumnya konflik akan menimbulkan dampak negatif sehingga muncul persepsi bahwa konflik cenderung merugikan berbagai pihak yang terlibat.

Dalam mempelajari konflik, hendaknya dapat membuat deskripsi yang jelas berkenaan dengan sumber yang memicu terjadinya konflik, termasuk konflik antar etnik. Sumber pemicu konflik dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni konteks terjadinya konflik dan sumber-sumber konflik. Mengenai konteks terjadinya konflik terutama konflik antar etnik dapat terjadi dalam beragam konteks, berawal dari antar pribadi, komunitas, komunal, regional, baik dalam negeri sendiri maupun antar negara. Konflik yang beragam konteks ini dapat terjadi karena ketidaksetaraan, dan perbedaan-perbedaan persepsi, orientasi nilai, motivasi, sikap serta tindakan dalam merespon situasi sosial, ekonomi, politik dan ideologi. Konteks terjadinya konflik antar pribadi dalam aspek sosial budaya terjadi karena perbedaan kebudayaan, tradisi, agama, adat-istiadat dan bahasa, dalam aspek ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, aspek ideologi dan politik seperti pilihan politik dan identitas politik yang menjadi dasar pilihan individu.

Sumber atau sebab terjadinya konflik secara umum dapat dilihat pada konflik nilai yang melibatkan dua pihak memberikan nilai yang berbeda atas apa yang

menjadi objek konflik. Kurangnya komunikasi juga bisa menyebabkan terjadinya konflik. Ketidakcocokan peran, perubahan keseimbangan dan konflik yang belum terpecahkan juga menjadi penyebab timbulnya konflik.

Dengan memperhatikan konteks dan penyebab timbulnya konflik, maka akan menghasilkan konflik yang fungsional dan disfungsional. Konflik yang fungsional menghasilkan keluaran berupa pembaruan kualitas keputusan, menghadirkan inovasi, kreativitas baru, meningkatkan perhatian, kepentingan dan rasa ingin tahu, serta melakukan evaluasi diri. Tindakan semacam ini dalam konteks sosial diharapkan dapat mewujudkan integrasi sosial, karena terjadi saling mengisi, melengkapi antar pihak yang terlibat dalam interaksi dan komunikasi. Sebaliknya, konflik disfungsional memunculkan hambatan komunikasi, mengurangi derajat kohesi, mengganti tujuan dengan permusuhan, membuat kelompok makin berkurang fungsinya dan saling mengancam karena ada daya juang di antara kelompok tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan disintegrasi antar kelompok yang terlibat dalam konflik.

Persoalan proses integrasi masyarakat multietnik terletak pada kurangnya sikap toleransi, keterbukaan dan menghargai perbedaan yang ada baik suku, agama, ras maupun adat istiadat. Selain itu, era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi dapat pula menjadi faktor yang menimbulkan kesenjangan pemahaman wargatentang konsep integrasi di Kabupaten Ketapang. Selain itu, adanya keterbatasan pemahaman tentang otonomi daerah dan adanya politik identitas pada masyarakat dapat pula menjadi pemicu munculnya konflik.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Tohardi, dkk. (2003), Bahari (2005), Fatmawati (2007), Setiawan (2011) dan Saroni (2012) tentang isu konflik, harmonisasi dan integrasi sosial di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat menunjukkan bahwa:

1. Konflik sosial terjadi karena kurangnya pemahaman tentang karakteristik etnik yang beragam.
2. Rendahnya hubungan sosial antaretnik dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan kesulitan untuk membangun integrasi sosial.
3. Rendahnya tingkat pendidikan warga masyarakat menjadi faktor penyebab munculnya konflik sosial.
4. Kurangnya penghargaan budaya lokal oleh warga pendatang (migran) menimbulkan ketidakharmonisan hidup bermasyarakat multi-etnik.
5. Rendahnya kesadaran untuk menjaga keseimbangan terhadap perbedaan etnik menjadi faktor penghambat integrasi sosial.
6. Kesalahpahaman dalam memaknai simbol budaya etnik tertentu (lokal) oleh etnik pendatang (migran), faktor ekonomi dan subyektivitas individu yang berbeda etnik merupakan sikap yang dapat menimbulkan konflik.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Mengapa hubungan antaretnik di Kabupaten Ketapang menunjukkan harmonisasi? dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya jika dilihat dari perspektif proses integrasi sosial?

Dari rumusan masalah tersebut, dapat dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi komunitas etnik tentang integrasi sosial dalam menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kabupaten Ketapang?
2. Aspek-aspek apa sajakah yang menjadi pengendali konflik antaretnik di Kabupaten Ketapang dan menyebabkan keharmonisan hidup bermasyarakat yang selama ini terjadi?
3. Bagaimanakah upaya yang sudah dilakukan oleh *stakeholder* untuk mempertahankan integrasi sosial dalam menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kabupaten Ketapang?
4. Bagaimanakah peran institusi pendidikan Sekolah Dasar dalam menginternalisasikan nilai-nilai integrasi sosial untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat kepada peserta didik di Kabupaten Ketapang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum menemukan bentuk internalisasi nilai integrasi sosial dalam menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat pada komunitas etnik di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis persepsi komunitas etnik tentang integrasi sosial dalam menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kabupaten Ketapang.
2. Menganalisis aspek-aspek yang menjadi pengendali konflik antaretnik di Kabupaten Ketapang dan menyebabkan keharmonisan hidup bermasyarakat yang selama ini terjadi.

3. Menganalisis upaya yang sudah dilakukan oleh *stakeholder* untuk mempertahankan integrasi sosial dalam menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kabupaten Ketapang.
4. Menggali peran institusi pendidikan Sekolah Dasar untuk menanamkan nilai-nilai integrasi sosial dalam menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat pada peserta didik di Kabupaten Ketapang.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Terdapat signifikansi teoritis dan praktis dalam karya ini. Secara teoritis, karya ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai integrasi sosial di dalam masyarakat yang sangat plural, khususnya di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri, yakni bahwa dibandingkan dengan potensi konsensus, potensi konflik cenderung laten. Jadi, teoritisasi tentang internalisasi nilai integrasi sosial dalam masyarakat yang plural perlu mempertimbangkan isu-isu pluralisme.

Secara praktis, karya ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang khususnya dan masyarakat Kalimantan Barat umumnya dalam menginternalisasikan nilai integrasi sosial untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat, sehingga terbina harmonisasi hidup berbangsa dan bernegara secara rukun, tertib, aman, damai, dapat berkiprah positif dalam membangun diri sendiri, keluarga, serta masyarakat sekitar.

Selanjutnya dalam lingkungan pendidikan formal (sekolah) internalisasi nilai integrasi sosial untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat dapat dilakukan guru kepada peserta didik secara terintegrasi melalui proses pembelajaran pada mata pelajaran yang ada dalam kurikulum sekolah.

Memberikan informasi bagi pengambil kebijakan tentang bentuk-bentuk integrasi sosial untuk menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat di Kabupaten Ketapang khususnya dan kabupaten lain di Kalimantan Barat umumnya.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Dalam bagian ini akan diungkapkan secara beurutan keseluruhan isi disertasi, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, mencakup: a. Latar Belakang Penelitian, b. Identifikasi dan Perumusan Masalah, c. Tujuan Penelitian, d. Manfaat/Signifikansi Penelitian, e. Struktur Organisasi Disertasi. Bab II Kajian Pustaka, meliputi: a. Nilai dalam Konteks Pendidikan Umum, b. Integrasi Sosial, c. Harmonisasi Antaretnik, d. Upaya *Stakeholder* dalam Mempertahankan ISHHB, e. Peran Institusi Pendidikan dalam Menginternalisasikan Nilai ISHHB, f. Hasil Penelitian Terdahulu, g. Kerangka Pemikiran (Paradigma Penelitian). Bab III Metode Penelitian, meliputi: a. Pendekatan Penelitian, b. Metode Penelitian yang digunakan, c. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data, d. Definisi Konseptual, e. Lokasi dan Subjek Penelitian. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mencakup: a. Hasil Penelitian, b. Pembahasan Hasil Penelitian. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.